

Kontrak Kerja Sama
ANTARA
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
DENGAN
SD NEGERI 03 PEKAT

NOMOR : KKA.330/B7.15/ST.2.05/2025
NOMOR : 800/255/SDN-03/PKT/2025
TENTANG
PENGELOLAAN DANA PELATIHAN KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL
(KKA) BAGI GURU DI
SD NEGERI 03 PEKAT

Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan delapan tahun dua ribu dua puluh lima (06-08-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan antara:

1. Nama : Muhammad Irawan Prasetyo
NIP : 198606172014041003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec.
Sekarbela, Kota Mataram, NTB, Kode Pos 83116

Bertindak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Siti Asni, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Desa Nangamiro, Kecamatan Pekat, Kab.Dompu

Bertindak untuk dan atas nama SD Negeri 03 Pekat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPK.
2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pimpinan SD Negeri 03 Pekat.

Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (Pelatihan KKA) bagi Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung jawab bagi PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan KKA bagi Guru;
- (2) Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi pengelolaan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan KKA bagi Guru.

Pasal 2

Untuk tujuan kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan:

1. Pelaksanaan pelatihan/kegiatan Pelatihan KKA bagi Guru;
2. Menyediakan sumber data yang sesuai PARA PIHAK.

Pasal 3 Bentuk Kerja Sama dan Mekanisme

Untuk kerja sama adalah pelaksanaan dan pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru melalui penunjukan dan penunjukan dengan target sasaran sebanyak 1 (satu) orang guru.

Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PNPB Fungsional Pelatihan KKA bagi Guru yang terdiri dari komponen biaya pelatihan antara lain belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja jasa profesi sebagai pembentuk tarif PNPB Fungsional. Komponen biaya tersebut tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi;
 - b. menyusun RAB pembiayaan di luar komponen PNPB Fungsional atas layanan PNPB bagi Guru yang meliputi antara lain belanja konsumsi bagi peserta, penceramah, pengajar dan panitia serta perjalanan dinas dan akomodasi (jika diperlukan) bagi penceramah, pengajar dan panitia. Biaya pelatihan di luar komponen PNPB Fungsional atas layanan PNPB akan disalurkan oleh PIHAK KEDUA ke rekening RPL;
 - c. membuka rekening penerimaan PNPB dan rekening RPL yang digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan proses penyeberan ke Kas Negara atas komponen PNPB Fungsional dan pengajuan Maksimum Pencatran (MP) serta proses pencairan/pengeblahan dana PNPB dari PIHAK KEDUA;
 - e. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL;
 - f. menyelenggarakan Pelatihan KKA bagi Guru sesuai dengan struktur program yang telah ditetapkan;
 - g. menyiapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan KKA bagi Guru kepada PIHAK KEDUA;
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru kepada PIHAK KEDUA; dan
 - i. Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan KKA bagi Guru.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengalokasikan biaya Pelatihan KKA bagi Guru yang meliputi tarif PNPB Fungsional dan biaya di luar komponen PNPB Fungsional atas layanan PNPB sesuai kontrak kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. melakukan pembayaran komponen pendanaan PNPB fungsional dan komponen di luar PNPB Fungsional kepada PIHAK KESATU melalui Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait PNPB kepada PIHAK KESATU melalui rekening RPL (Reksa Virtual Account pembayaran);
 - c. mengalokasikan dan melakukan pembayaran langsung untuk transport dan penginapan peserta Pelatihan KKA bagi Guru, sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. menerima kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan KKA bagi Guru dari PIHAK KESATU; dan
- e. menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru dari PIHAK KESATU.

Pasal 5 Pembiayaan

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler dengan mekanisme PNBP yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
- (2) Biaya Pelatihan KKA bagi Guru sebagaimana (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rp.2.849.800 (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) /orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya PNBP Fungsional sebesar Rp1.250.450/orang
 - b. Biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNBP sebesar Rp1.599.350/orang
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b belum termasuk akomodasi dan transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler
- (4) Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan KKA bagi Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) adalah sebesar Rp2.849.800 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya PNBP Fungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.250.450
 - b. Biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNBP sebesar Rp1.599.350

Pasal 6 Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru dengan mekanisme PNBP fungsional dan komponen di luar PNBP fungsional kepada PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:
Kode VA pembayaran : Terlampir pada sistem
Bank : Mandiri
- (2) PIHAK KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui rekening RPL atas komponen PNBP Fungsional.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan paling lambat hari ke-3 (tiga) saat IN 1 berjalan;
- (4) PIHAK KESATU akan mengembalikan sisa dana Pelatihan KKA bagi Guru pada rekening RPL (jika ada) ke Kas Negara pada akhir pelaksanaan pelatihan.

Pasal 7 Ketentuan Pajak

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Jangka Waktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA

Pasal 9
Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajib diberikan secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat

PIHAK KEDUA
SD Negeri 03 Pekat

PPK
Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram
No Telp (0370) 620870
Surel: bgtkntb@kemendikdasmen.go.id

Kepala Sekolah
Jalan Lintas Labuan Kananga-Dompu
No Telp: 085338222056
Surel : sitiasni01@admin.sd.belajar.id

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 13
Lain-lain

- (1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang akan mengikuti Pelatihan KKA.
- (2) Apabila sasaran yang mengikuti Pelatihan KKA berkurang dari target dengan alasan apapun setelah dana PNBPF fungsional disetorkan ke Kas Negara, maka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat dikembalikan dan diakui sebagai pendapatan Negara.

Pasal 14
Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai

PIHAK KESATU

Muhammad Irawan Prasetyo
NIP198606172014041003

Dompu, 06 Agustus 2025

PIHAK KEDUA



Siti Asni, S.Pd
NIP. 196911201996032006